

bulletin bpkSDM

Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia
Departemen Pekerjaan Umum



PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) KONSTRUKSI BELUM MENJADI SUATU KESATUAN PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

5 Aplikasi Konsep
Manajemen Risiko Pada
Industri Konstruksi

10 Peran Quantity Surveyor
di Industri Konstruksi
Indonesia

D a f t a r I s

GCG Dan Profesionalisme Pelaku Jasa Konstruksi	4
Aplikasi Konsep Manajemen Risiko Pada Industri Konstruksi	5
Peran Quantity Surveyor di Industri Konstruksi Indonesia	10
Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Belum Menjadi Suatu Kesatuan Pada Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi	12
Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bagi Calon Anggota Dewan LPJK	14
Konstruksi Indonesia Bersiap Hadapi Tantangan Global	15
Komitmen Mou Indonesia-india, Dep. Pu Laksanakan Kembali Pelatihan Tukang Konstruksi	15
Kontribusi Konstruksi Indonesia Untuk Palestina	16

D a r i R e d a k s i

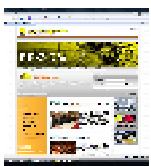
Jasa Konstruksi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam upaya pembangunan di Indonesia. Infrastruktur yang menjadi produk jasa konstruksi mengambil peran yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Melihat betapa pentingnya peran ini maka tak salah bahkan menjadi suatu keharusan, pelaksanaan segala kegiatan di sektor konstruksi harus diatur, diawasi, dan tentu saja dilaksanakan dengan semaksimal dan sebaik mungkin sesuai ketentuan yang berlaku di negara ini.

Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia Dep. PU sebagai agen pemerintah yang membina sektor konstruksi di Indonesia, dalam Buletin edisi kali ini mempersembahkan artikel-artikel mengenai seluk beluk jasa konstruksi baik dari sisi pelaku, manajemen, industri, lembaga, dan tantangan dunia konstruksi. Salah satu artikel yang patut disimak antara mengenai Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi (yang) Belum Menjadi Suatu Kesatuan Pada Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi. Mengingat isu K3 pada pekerjaan konstruksi yang baru-baru mencuat setelah kecelakaan yang menimpa pekerja konstruksi akibat tidak disiplinnya penerapan K3.

Selain itu patut disimak pula artikel mengenai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bagi Calon Anggota Dewan LPJK, sebagai persiapan menjelang suksesi pada Lembaga Pengawas Jasa Konstruksi di Indonesia. Tak hanya itu, bulletin kali ini juga menampilkan galeri foto seputar kegiatan BPKSDM serta *flash news* sekitar perkembangan dunia konstruksi Indonesia dalam kiprahnya menghadapi globalisasi, selain juga artikel-artikel menarik lainnya.

Akhirnya kepada seluruh pembaca bulletin BPKSDM, kami mengucapkan Selamat Membaca dan Selamat Menikmati.

S u r a t P e m b a c a



Tim redaksi bulletin BPKSDM...
Kenapa sulit sekali untuk download ke website BPKSDM?
Wilson
Jayapura

Dear, Buletin...
Bagaimana cara menjadi kontributor bulletin BPKSDM?
Priyobowo
DI Yogyakarta

Pembina/Pelindung : Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia;

Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia; **Wakil Penanggung Jawab** : Kepala Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi, Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi, Kepala Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi, Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi; **Pemimpin Redaksi** : Surtiningsih;

Redaksi Pelaksana : Nanan Abidin; **Anggota Redaksi** : Doedoeng Z. Arifin, Bambang Soekaryatno, Eddy Sunyoto, Sari Mustika, Yaya Supriyatna, Ero, Cakra Nagara, Agnes S.P. Trisnowati, Titik Murti Utami, Subagio, Yanto Apriyanto, Sri Yuliawati, Madya Gunawan, Agus Firngadi, Sugeng Sunyoto, Krisnawati Pratiwi Hadi, Meylina Hasbullah;

Administrasi dan Distribusi : Agus Kurniawan, **Desain/Tata letak** : Nanang Supriyadi **Photografer** : Sri Bagus Herutomo

Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi – Nazarkhan Yasin

Buku ini sebagai referensi yang berharga bagi masyarakat konstruksi Indonesia, terutama sebagai pengetahuan yang terkait dengan masalah-masalah hukum dalam usaha jasa konstruksi. Disini akan diperkenalkan mengenai Klaim seperti perkembangan, pengertian, pembahasan, penanganan, teknik dan kiat memanfaatkan peluang Klaim, cara-cara menyelesaikan sengketa konstruksi, arbitrase (mengetahui arbitrase, cara menyusun permohonan, proses persidangan dan pembatalan putusan). Beberapa kesimpulan yang disampaikan oleh penulis ialah 1. Pengguna Jasa tidak perlu merasa "alergi" terhadap klaim, dilain pihak Penyedia Jasa agar tidak "takut" lagi mengajukan klaim. 2. Penyusunan permohonan arbitrase untuk penyelesaian sengketa konstruksi sangat dianjurkan menggunakan jasa konstruksi hukum yang menguasai dan berpengalaman dalam industri jasa konstruksi. 3. Sangat dianjurkan bahwa cara penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase, baik Lembaga maupun Ad Hoc, merupakan pilihan terbaik. Buku ini dilengkapi dengan lampiran yang memuat 5 peraturan dan perundang-undangan tentang arbitrase dan ICC rules.

(R. Sulistyowati)



Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Buku kedua seri hukum konstruksi
oleh Ir. H. Nazarkhan Yasin
Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama
Jakarta, 2004

Quote Quotes

• BERPIKIR NEGATIF

Menebarkan energi negatif, merusak kesehatan, menggerus daya hidup, men-SWITCH OFF otak kita.

• BERPIKIR POSITIF

Menebarkan energi positif, menyehatkan, memperkuat daya hidup, men-SWITCH ON otak kita.

• FACT yang tidak bisa berubah

1. Orang yang SUDAH MATI.
2. Orang yang PUNYA KELAINAN.
3. Orang yang TIDAK MAU BERUBAH.

• *Orang yang memelihara pekerjaannya dengan baik, pekerjaannya juga memelihara orang itu dengan baik. (George Chapman)*

• *Berfikir positif adalah kunci sukses dalam bidang pekerjaan apa saja. Berharaplah yang terbaik, dan bersiap menghadapi yang terburuk. (Ron Jaworski)*

Subscribe



Bulletin BPKSDM mengupas tentang Konstruksi Indonesia. Untuk berlangganan atau hendak menjadi kontributor, dapat menghubungi :

Tim Redaksi Bulletin BPKSDM Dep. PU

Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
Telp : (021)7266639
Email : datinfo25@yahoo.com
http : //bpk SDM.pu.go.id

GCG dan Profesionalisme

Pelaku Jasa Konstruksi

Oleh : Doedoeng Z. Arifin *)



ewasa ini, jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh



memberikan peluang yang semakin luas bagi jasa konstruksi nasional. Fenomena tersebut merupakan tantangan bagi jasa konstruksi nasional untuk

anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.

meningkatkan kinerjanya agar lebih kompetitif, profesional dan mampu menghadapi dinamika perkembangan pasar dalam dan luar negeri.

Sehubungan dengan hal itu, jasa konstruksi nasional diharapkan semakin mampu mengembangkan perannya dalam pembangunan nasional, di antaranya melalui peningkatan keandalan yang didukung oleh struktur usaha yang kokoh dan mampu mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Keandalan tersebut tercermin dalam daya saing dan kemampuan menyelenggarakan pekerjaan konstruksi secara lebih efisien dan efektif, sedangkan struktur usaha yang kokoh tercermin dengan terwujudnya kemitraan yang sinergis antar penyedia jasa, baik yang berskala besar, menengah, dan kecil, maupun yang berkualifikasi umum, spesialis, dan terampil.

Untuk mendorong pengembangan jasa konstruksi, perlu diwujudkan pula ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi guna menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban.

Sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan perluasan cakupan, kualitas hasil maupun tertib pembangunan, telah membawa konsekuensi meningkatnya kompleksitas pekerjaan, tuntutan efisiensi, tertib penyelenggaraan, serta kualitas hasil pekerjaan konstruksi. Selain itu, tata ekonomi dunia telah mengamankan hubungan kerja sama ekonomi internasional yang semakin terbuka dan

Globalisasi politik, ekonomi dan keuangan telah mendorong industri konstruksi di seluruh belahan dunia, termasuk industri konstruksi nasional menjadi pemain kelas dunia. Artinya, industri konstruksi nasional harus kompetitif di pasar domestik dan memasuki serta merebut pasar internasional.

Secara praktis, industri konstruksi dituntut menunjukkan kinerja yang tinggi, baik di sisi masukan, proses, keluaran maupun sistem manajemen. Hal ini bisa dicapai jika industri konstruksi nasional semakin (i) profesional, produktif dan progresif; (ii) berbasis ilmu dan teknologi serta para pekerja yang terampil tinggi (*workmanship*); (iii) memiliki kapasitas superior dan sinergi melalui kemitraan dan usaha-usaha bersama seluruh pihak pemangku kepentingan; (iv) mampu mengintegrasikan seluruh proses agar tercapai "*buildability*" yang lebih besar; (v) mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta "*cost effectiveness*"; dan (vi) memiliki kecakapan tinggi sebagai industri ekspor.

Dalam rangka menjadi kelas dunia, pengusaha industri konstruksi selain memenuhi persyaratan teknis di atas, dia harus mengembangkan diri menjadi industri yang

produktif dan terintegrasi serta menerapkan *good corporate governance* (GCG). Istilah dan teori GCG memang relatif baru dikenal dan dikembangkan. Namun demikian, substansinya telah dilaksanakan sejak lama. Istilah tersebut untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Tricker pada tahun 1976 dalam buku "*The Independent Director*". Tricker kemudian menulis buku tentang "*Corporate Governance*" pada tahun 1984. Karena perhatiannya yang sangat mendalam dalam bidang tersebut, Ticker akhirnya dijuluki sebagai "*Father of Corporate Governance*".

Banyak lembaga memberikan pengertian mengenai *good corporate governance* (GCG), diantaranya yang dikemukakan oleh Pricewaterhouse Coopers: "*Good corporate governance is about effective decision making. It is founded upon organizational culture, ethics, value, systems, processes, policies and structures which aimed at fostering and promoting business prosperity, efficient and effective management of resources and risk and corporate accountability to share holders and stakeholders.*"

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, *good corporate governance* dapat dijelaskan sebagai pola hubungan antara manajemen perusahaan dengan stakeholders dan komisaris (*shareholders*) yang:

- ditujukan untuk mencapai kinerja (*performance*) yang maksimal dan dirasakan oleh semua stakeholders;
- dilandasi oleh budaya perusahaan, etika dan nilai-nilai (*values*) serta
- didukung oleh system, proses bisnis, pedoman kerja dan struktur organisasi yang baik.

Terdapat empat prinsip dasar GCG yaitu *transparency* (keterbukaan), *fairness* (perlakuan yang sama), *accountability* (pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi, misi



dan sasaran) dan *responsibility* (pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat).

Implementasi GCG dalam industri jasa konstruksi akan membawa perusahaan menjadi lebih efisien dan mampu memberikan pelayanan atau perbaikan pola kerja termasuk pengambilan keputusan, sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih baik.

Di samping itu, pelaksanaan GCG juga bermanfaat untuk:

- menciptakan landasan untuk berkembang dalam jangka panjang
- meningkatkan kepercayaan investor; (berdasarkan suatu survey, investor bersedia membayar 20 – 30 % lebih tinggi dari harga saham bagi perusahaan yang melaksanakan GCG).
- pelaksanaan GCG mempermudah diperolehnya pembiayaan dengan harga yang lebih rendah dan syarat-syarat yang lebih baik.
- meningkatkan *corporate value* dan kepuasan para stakeholders.

Industri konstruksi nasional juga perlu mengembangkan diri agar berbasis teknologi informasi, pembatasan penggunaan tenaga tidak terlatih, dan memberikan kesempatan kepada industri konstruksi melakukan regulasi dalam lapangan permainan sendiri. Di samping itu industri konstruksi membutuhkan dukungan dari inovasi material dan proses produksi yang sarat teknologi dan berkelanjutan serta hemat energi. Selain itu, para pemain industri konstruksi harus yakin bahwa produknya dapat menciptakan lingkungan yang harmonis atau dengan kata lain menerapkan *sustainable construction development*.

Kinerja kunci yang diperlukan oleh perusahaan jasa konstruksi dalam memasuki wilayah global adalah: (i) kepemimpinan yang kuat, (ii) keandalan manajemen orang, (iii) ketepatan kebijakan dan strategi, (iv) mengembangkan kemitraan dan jaminan ketersediaan sumberdaya, (v) proses yang efisien dan transparan, dan (vi) hasil keluaran yang berkualitas. ♦ (dza 0707)

Penulis adalah Kasubag Evaluasi dan Monitoring, Sekretariat BPKSDM

APLIKASI KONSEP MANAJEMEN RISIKO PADA INDUSTRI KONSTRUKSI

Oleh: **Nugroho Wuritomo ***)

Industri Konstruksi dan Risiko

INDUSTRI Konstruksi pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan yang berdasarkan pada sistem rekayasa (*engineering system*) yang bersifat unik dan khas untuk setiap kegiatannya. Dalam berhadapan dengan suatu sistem rekayasa sudah barang tentu tidak dapat dipandang dengan memakai pengertian yang terpenggal-penggal atau sepotong demi sepotong, melainkan keseluruhannya merupakan kesatuan konsep sistem yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lainnya.

Upaya konstruksi yang dimaksud di sini bukan hanya ditekankan untuk pelaksanaan pembangunan fisiknya saja, akan tetapi mencakup keseluruhan konsep proses konstruksi dalam arti yang selengkapnyanya mulai dari dikemukakannya gagasan, kemudian ditindaklanjuti dengan survei, penyusunan perencanaan, perancangan detail, sampai dengan bangunan benar-benar berhasil diwujudkan dan berfungsi sesuai dengan tujuan fungsionalnya.

Proses konstruksi yang memakan waktu cukup lama dan sedemikian kompleksnya dapat menimbulkan ketidakpastian yang pada akhirnya akan memunculkan berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi produktivitas, prestasi (*performance*), kualitas dan anggaran biaya proyek. Oleh karena itu, sebelum sampai pada keputusan untuk membangun, maka perlu dilakukan analisis terlebih dahulu terhadap berbagai risiko proyek dan ketidakpastiannya agar dapat ditetapkan langkah-langkah antisipatif dan pengelolaannya.

Perlu diketahui bahwa keberadaan manajemen risiko pada industri konstruksi di Indonesia saat ini masih dalam keadaan infant, dimana sebagian besar manajer

proyek masih memutuskan suatu keputusan yang berkaitan dengan risiko berdasarkan intuisi, penilaian personal dan pengalamannya daripada menggunakan pendekatan manajemen risiko yang formal dan sistematis. Apabila dikaji lebih mendalam, pada dasarnya ada empat pendekatan perilaku dari pihak manajemen terhadap risiko yang selama ini berkembang dalam industri konstruksi di Indonesia, yaitu:

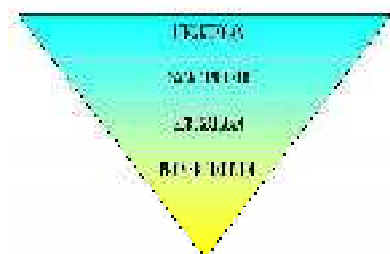
- (1) *the umbrella approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membiarkan setiap kemungkinan untuk terjadi dengan menambahkan alokasi dana untuk "premi risiko" yang cukup besar pada nilai proyek;
- (2) *the ostrich approach*, yaitu pendekatan dengan mengabaikan semua risiko yang mungkin terjadi dengan pengandaian bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar dan bahwa bagaimanapun juga risiko yang terjadi akan mampu diatasi;
- (3) *the intuitive approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengambil sikap tidak percaya pada analisis yang bersifat perkiraan, melainkan lebih percaya kepada intuisi dan ketajaman perasaan saja.
- (4) *the brute force approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memfokuskan diri pada risiko yang sebenarnya tidak dapat dikontrol dengan mengembangkan sikap percaya diri bahwa semua keadaan yang terjadi akan dapat dikendalikan.

Perilaku-perilaku diatas tanpa disadari sebenarnya sangat berbahaya, baik bagi kelangsungan internal proyek maupun bagi perkembangan industri konstruksi di Indonesia. Karena risiko proyek konstruksi yang tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan efek detrimental terhadap waktu, biaya dan performa kualitas proyek. Bahkan dapat juga mempengaruhi

kesuksesan bisnis konsultan dan kontraktor, maupun partisipan yang secara tidak langsung terlibat dalam proyek tersebut. Dengan demikian, dalam industri konstruksi perlu diterapkan strategi-strategi yang ada dalam manajemen risiko sedini mungkin. Berikut ini dipaparkan secara ringkas mengenai konsep implementasi manajemen risiko dalam proyek konstruksi yang diolah dari berbagai sumber literatur.

Pengertian dan Klasifikasi Risiko Konstruksi
Istilah risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, yang umumnya secara intuitif sudah kita pahami apa yang dimaksudkan. Namun dalam bidang konstruksi, risiko secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu kemungkinan (possibility) terjadinya sesuatu yang tidak terduga sebelumnya, yang bersifat merugikan dan dapat mempengaruhi penyelesaian proyek konstruksi secara keseluruhan yang berkaitan dengan waktu, biaya, dan kualitas.

Lebih lanjut, risiko-risiko yang ada pada industri konstruksi dapat diklasifikasikan ke dalam suatu bentuk piramida risiko sebagai berikut ini.

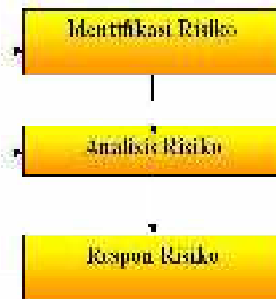


Gambar 1. Hirarki Risiko

Risiko lingkungan secara umum dibagi menjadi 2, yaitu risiko fisik (misalnya, cuaca buruk dan gempa bumi) dan risiko politik, sosial, ekonomi (misalnya, inflasi dan fluktuasi kurs). Risiko pasar/industri berkaitan dengan berbagai peristiwa yang mempengaruhi keseluruhan industri, seperti pemogokan nasional dan persaingan harga yang tidak sehat. Sedangkan risiko perusahaan dan risiko proyek secara intrinsik berhubungan, karena apabila suatu kontraktor mengalami kerugian besar pada proyeknya, maka akan berakibat pula pada performance finansial perusahaannya. Proyek yang terdiri dari banyak aktivitas dan sumber daya secara otomatis akan melibatkan pula individu-individu di dalamnya.

Konsep Manajemen Risiko

Secara sederhana, manajemen risiko terdiri dari tiga komponen proses, yaitu: identifikasi risiko, analisis risiko dan respon terhadap risiko seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Komponen Manajemen Risiko

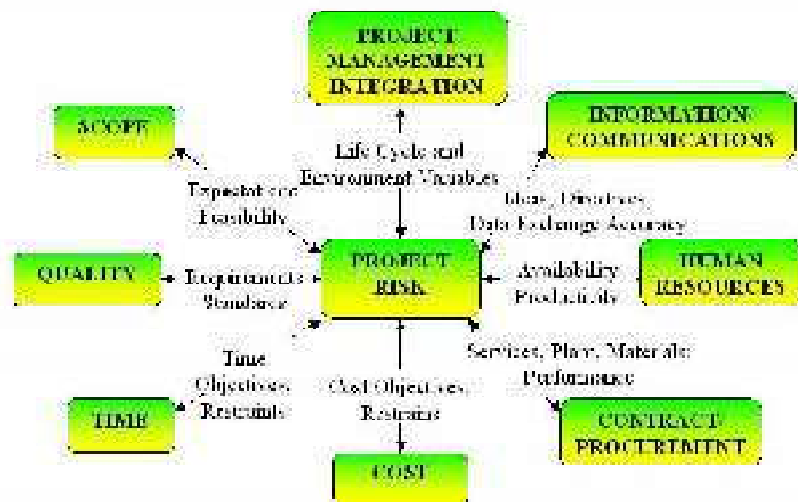
Pendekatan sistematis dalam menghadapi risiko melalui manajemen risiko menyediakan cara untuk memperbaiki performa kerja pihak-pihak yang terlibat dalam proses konstruksi. Pendekatan manajemen risiko sebagai fungsi manajemen yang proaktif terhadap aspek-aspek risiko pada proyek konstruksi akan menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar bagi pihak manajemen proyek. Di sisi lain, perkembangan kompleksitas pekerjaan konstruksi saat ini akan menyebabkan kebutuhan penerapan manajemen risiko yang efektif akan semakin meningkat. Gambar 3

memperlihatkan secara skematik bagaimana fungsi manajemen risiko proyek terpaut, sehingga tak memungkinkannya untuk keluar dari fungsi manajemen proyek penting lainnya. Terlihat pula bagaimana wawasan risiko terhubung dengan fungsi-fungsi manajemen proyek secara individual. Tiap hubungan harus secara teliti dievaluasi sebagai bagian dari tanggung jawab manajemen risiko.

(1) Identifikasi risiko

Tahap identifikasi risiko mendapatkan perhatian yang lebih kecil dalam literatur-literatur tentang risiko. Banyak profesional yang telah berpengalaman melakukan analisis risiko pada proyek-proyek keuangan mengatakan bahwa tahap identifikasi ini paling menyita waktu. Sementara itu penulis lain menyajikan tahap identifikasi risiko ini sebagai proses mengidentifikasi sumber-sumber risiko. Sumber-sumber risiko itu seringkali dilihat sebagai variabel dalam suatu ramalan. Secara umum hal ini disebabkan oleh perkembangan teknik-teknik analisis kuantitatif yang telah dikembangkan. Hal ini mengharuskan risiko-risiko harus dalam bentuk variabel sehingga dapat dikuantifikasi.

Untuk beberapa bentuk risiko, variabilitas dalam data bisa jadi merupakan pendekatan yang tepat. Untuk bentuk risiko yang lain, tinjauan lebih luas tentang apa yang membentuk



Gambar 3. Pengintegrasian manajemen risiko dengan fungsi manajemen proyek

risiko tersebut menjadi lebih penting untuk dilakukan. Jadi setelah risiko diidentifikasi, maka harus dilakukan pengidentifikasian hubungan atau ketergantungan diantara risiko-risiko tersebut karena ketergantungan itu mungkin menunjukkan risiko yang lebih signifikan daripada risiko itu berdiri sendiri. Jadi, proses identifikasi risiko tidak boleh melihat risiko sebagai hal yang independen namun hubungan antar risiko tersebut juga harus diidentifikasi.

(2) Analisis risiko

Tujuan dari analisis risiko adalah untuk mempelajari faktor-faktor risiko yang telah diidentifikasi dan untuk mendapatkan pemahaman tentang sifat alami risiko tersebut. Pengembangan teknik-teknik analisis risiko ini mendapat banyak perhatian dari para penulis dan peneliti. Pengembangan tersebut telah menghasilkan teknik-teknik analisis risiko seperti: *brainstorming*, analisis sensitivitas, analisis probabilitas, metode Delphi, analisis Monte Carlo, teori keputusan dan sederet nama teknik-teknik lainnya.

(3) Respon terhadap risiko

Secara garis besar ada empat opsi respon terhadap risiko yang telah didefinisikan, yaitu menanggung risiko (*risk retention*), mengurangi risiko (*risk reduction*), mengalihkan risiko (*risk transfer*), dan menghindari risiko (*risk avoidance*). Empat opsi respon ini akan ditetapkan setelah proses identifikasi dan analisis terhadap risiko yang spesifik pada proyek konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor.

Strategi Pengalokasian Risiko
Strategi pengalokasian risiko dalam industri konstruksi biasanya dilakukan dengan empat cara, yaitu menanggung (*retention*), mengurangi (*reduction*), mengalihkan (*transfer*) atau menghindari (*avoidance*) risiko.

Penggunaan strategi pengalokasian risiko ini dapat berbeda antar pihak yang menghadapinya, baik pada proyek yang sejenis maupun tidak. Selain itu, tidak terdapat teknik terbaik yang memberikan suatu solusi pemecahan masalah yang tepat. Penggunaan strateginya dapat terpisah atau dikombinasikan tergantung dari masalah yang dihadapi.

a. Menanggung risiko

Menanggung risiko (*risk retention*) merupakan pengakuan atas keberadaan risiko, dan menerima akibatnya jika terjadi kerugian. Dalam menjalankan strategi menanggung risiko ini, terdapat dua tipe yang membedakannya, yaitu yang direncanakan atau disengaja, dan tidak direncanakan atau tidak disengaja. Menanggung risiko yang direncanakan merupakan anggapan atau perkiraan secara sadar dan disengaja dari risiko yang telah diketahui. Sedangkan menanggung risiko yang tidak terencana yaitu karena risiko yang akan terjadi tidak teridentifikasi atau tidak dikenal sebelumnya dan secara tidak sadar atau tidak disengaja menanggung risiko tersebut.

Keputusan suatu organisasi proyek untuk menerima risiko umumnya disebabkan karena organisasi proyek tersebut memiliki kemampuan untuk mengelola risiko, tidak sanggup untuk

mengalokasikan risiko kepada pihak ketiga, dan tidak sanggup untuk menghindari faktor risiko.

b. Pengurangan risiko

Strategi pengurangan risiko (*risk reduction*) merupakan aktivitas yang dibuat untuk mengurangi frekuensi dan keparahan dari kerugian akibat risiko. Tujuan dari strategi ini adalah merubah karakteristik dari akibat risiko sehingga dapat lebih diterima oleh perusahaan yang akan menghadapinya.

Strategi pengurangan risiko dapat dilakukan dengan cara mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau mengadakan tindakan-tindakan pencegahan untuk mengurangi frekuensi kerugian akibat risiko. Cara lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi keberadaan risiko, yaitu dengan membagi (*share*) risiko kepada pihak lain, pemisahan (*separation*), duplikasi (*duplication*), *contingency plans*, modifikasi proyek atau sistem konstruksi, dan meningkatkan manajemen informasi/komunikasi.

c. Pengalihan risiko

Pengalihan risiko (*risk transfer*) berarti pengalihan atas risiko, dimana manajer proyek mengalihkan seluruh atau sebagian risiko kepada pihak lain dalam bentuk kontrak. Berbagai jenis kontrak yang ada juga akan menentukan bagaimana pembagian risiko, misalnya antara pemilik proyek dengan kontraktor. Jenis kontrak yang dipakai biasanya disesuaikan dengan kondisi yang akan dihadapi. Bentuk yang umum dari pengalihan risiko adalah dengan asuransi, tetapi masih jarang dipakai pada industri konstruksi di Indonesia karena untuk mendapatkannya harus membayar premi asuransi yang relatif mahal. Tujuan asuransi adalah mengalihkan risiko ke dalam biaya tetap, dimana biaya nyata dari risiko telah diketahui.

d. Menghindari risiko

Menghindari risiko (*risk avoidance*) berarti bahwa tidak memperoleh kerugian atau meninggalkan kerugian yang akan terjadi akibat risiko. Keuntungan utama dari menghindari risiko adalah mengurangi kemungkinan



Gambar 4. Respon terhadap Risiko

kerugian menjadi sama sekali tidak ada. Strategi menghindari risiko mempunyai dua kerugian, yaitu tidak semua kerugian dapat dihindari, dan tidak mudah menghindari setiap kerugian. Adakalanya beberapa risiko tidak mungkin ditinggalkan, melainkan harus dihadapi. Untuk menghadapi hal ini, cara yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan memilih atau mendahulukan yang mudah ditangani, atau dengan kata lain memilih alternatif lain.

Konsep manajemen risiko bukanlah sesuatu yang khusus dalam bidang konstruksi. Bagaimanapun juga, manajemen risiko secara tradisional pada industri konstruksi sebenarnya telah memasukkan langkah-langkah penyusunan persepsi, evaluasi dan pengelolaan faktor-faktor risiko dengan pola-pola pengukuran melalui asumsi-asumsi, reduksi, transfer dan asuransi yang dilakukan.

Adapun tujuan utama dari suatu manajemen risiko sebenarnya adalah mengurangi (mitigate) risiko, yang antara lain dikerjakan dengan merevisi skedul proyek, dana, biaya maupun kualitas, sehingga ketidakpastian (*uncertainties*) dapat dikurangi tanpa menyebabkan pengaruh yang signifikan pada tujuan proyek.

Posisi Indonesia yang berada pada kawasan potensi pasar di poligon pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara dengan segala macam kecenderungan yang berkembang saat ini, menuntut para pelaku konstruksi untuk menerima manajemen risiko sebagai aspek utama dari manajemen proyek dan harus diintegrasikan secara penuh pada proses-proses konstruksi yang dilakukan. Namun demikian, masih sedikit informasi tentang respon industri konstruksi, khususnya para pelaku konstruksi di Indonesia tentang penerapan konsep manajemen risiko ini. •
(wuritomo@yahoo.com).

Penulis adalah Staf Pusbiktekn, BPKSDM Dep. PU



BPKSDM Dep. PU melaksanakan Pelatihan Hukum Kontrak Konstruksi yang dilaksanakan sejak 21 Mei hingga 22/06/2007



BPKSDM, Iwan Nursyirwan saat membuka Workshop Fasilitasi dan Pengembangan LPJK, Kamis (21/06/2006) di Jakarta



Penandatanganan MoU antara Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto dan menteri Luar Negeri Republik India, Pranab Mukherjee tentang bantuan Vocational Training Centre for Construction Services (VTCCS) di Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Senin (18/06/2006) di Jakarta



Galery Photo



Kepala BPKSDM, Iwan Nursyirwan, saat membuka Sosialisasi Pra Peraturan Pemerintah (Permen) Pedoman Penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi, Selasa (05/05/2006) di Jakarta



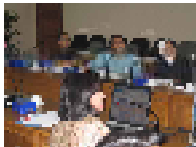
Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi (Pusbin KPK) BPKSDM Dep. PU, Djoko Subarkah, saat membuka Workshop Penyusunan Harga Satuan Pelatihan, Kamis (14/05/2006) di Jakarta



Kepala BPKSDM, Iwan Nursyirwan saat menyambut kunjungan DPRD Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau ke BPKSDM, Kamis, 31/05/2007 dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



Acara Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan di tiga tempat yaitu Wilayah Barat di Padang (30/04/2007) yang dibuka oleh Kepala BPKSDM, Wilayah Tengah, Surabaya (03/05/2007), yang diwakili Moch. Karim Direktur Pengembangan Wilayah Bangda Depdagri dan Wilayah Timur, Makassar 10/05/2007, yang dibuka oleh Sekretaris BPKSDM.



Melihat Kiprah Dep. PU dan BPKSDM khususnya dalam pelaksanaan E-Proc, Institut Pertanian Bogor (IPB) melakukan kunjungan ke BPKSDM dalam rangka studi banding pelaksanaan Sistem E-Procurement yang ada di BPKSDM, Rabu (30/05/2005)



Acara Penyusunan Pembahasan Program dan Kegiatan di Lingkungan Pusbikte dan Balai-balai serta satuan kerja di lingkungannya untuk Tahun Anggaran 2008/2009, Kamis (07/05/2006) di Bandung



Dep. PU melalui BPKSDM sebagai pembina jasa konstruksi Indonesia melaksanakan Pembekalan, uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengurus LPJK Tingkat Nasional Periode 2007-2011, Senin, 14/05/2007 di Jakarta.

PERAN QUANTITY SURVEYOR DI INDUSTRI KONSTRUKSI INDONESIA

Permadi Soemarahatianto

Praktisi dan Pendidik QS. Dewan Penasihat IQSI

Sejak pertengahan tahun 70'an nama "Quantity Surveyor" sudah tidak asing lagi di Indonesia. Waktu itu profesi *Quantity Surveyor* masih relatif baru di Indonesia dan para profesionalnya masih tenaga-tenaga asing, umumnya dari Malaysia dan Inggris. Sejak itu profesi "QS" pun mulai berjalan di beberapa proyek sebagai salah satu profesional di dalam tim konsultan diproyek-proyek. *Quantity Surveying* adalah ilmunya, sementara pelaku atau profesinya atau orang yang melakukannya disebut *Quantity Surveyor*.

Indonesia memang tidak mempunyai fasilitas pendidikan untuk melahirkan lulusan QS, sehingga tenaga lokal yang dimanfaatkan bekerja di perusahaan QS kebanyakan berpendidikan Insinyur Sipil dengan sedikit pengalaman dalam pengukuran volume. Untuk meningkatkan pemahaman mereka akan bidang QS di perusahaan-perusahaan tersebut diadakan latihan-latihan yang dibimbing oleh para QS asing.

Pada tahun 1973 para pakar QS dari berbagai perusahaan yaitu Widnell and Trollope Asia, Rider Hunt Levett and Bailey, Suckling Mc Donald dan Mohd. Isahak telah sepakat untuk menerbitkan "Standard Method of Building Works for Indonesia", yang merujuk pada 'SMM' Malaysia dan Australia. Tetapi sayang penggunaannya kurang meluas, malah banyak perusahaan tidak menggunakannya dalam prakteknya melainkan merujuk 'SMM International;' atau "POMI".

Sebelum masa krisis moneter di tahun 1997 terdapat lebih kurang 15 perusahaan QS di Indonesia tetapi memasuki masa krisis moneter banyak yang tutup dan setelah masa krisis moneter dimana industri

konstruksi kembali bangkit di era tahun 2000-an jumlahnya hanya sekitar 13 perusahaan itupun ada beberapa yang baru.

Profesi Apakah "Quantity Surveyor" Itu?

Quantity Surveyor adalah seorang ahli di bidang ekonomi bangunan dan adakalanya mereka disebut juga sebagai "Konsultan biaya konstruksi" (*construction cost consultant*). Profesi ini bermula dan berkembang dari negara Inggris dan menyebar ke seluruh negara persemakmuran Inggris dan negara-negara maju lainnya.

Melalui suatu pelatihan dan pelajaran khusus di bidang biaya dan harga-harga satuan konstruksi dan tata cara pengelolaan prosedur-prosedur kontrak maka *Quantity Surveyor* ini dapat memberi saran-saran mengenai pengendalian biaya dan pembangunan proyek agar tetap dalam batas anggaran biaya yang telah direncanakan. Tujuan dari pengendalian yang dilakukan adalah untuk memberi Pemberi Tugas proyek yang ekonomis dan dapat memberikan nilai tambah yang optimum atas biaya investasi yang dikeluarkan sebaliknya memberi keuntungan yang wajar pada para kontraktor yang efisien.

Quantity Surveyor secara profesi tidak saja bekerja sebagai konsultan profesional, tetapi dapat juga bekerja untuk para kontraktor. Bilamana mereka ini bekerja sebagai konsultan maka tugas mereka yang utama adalah untuk mengendalikan biaya proyek dan secara tidak langsung menjadi tangan kanan pemilik dari segi keuangan dan penanganan masalah-masalah legal dalam pelaksanaan proyek, sebagai *Quantity Surveyor* di

kontraktor, mereka ini biasanya akan memegang peran sebagai estimator atau sebagai manager kontrak. *Quantity Surveyor* kontraktor secara langsung akan menjadi "counter part" dari konsultan *quantity surveyor*. Tentunya pada bidang masing-masing *quantity surveyor* akan mengendalikan biaya proyek supaya tetap sesuai dengan biaya yang direncanakan dan sekaligus mengecek kewajaran untuk kontraktor.

Quantity surveyor dapat dilibatkan dalam proyek pada tahapan yang cukup fleksibel tergantung dari criteria yang ingin dicapai. Fungsi utama keterlibatan QS ke dalam proyek adalah untuk mengendalikan biaya proyek seperti yang disebut di atas idealnya pada awal proyek sehingga pada tiap tahapan proses perencanaan arsitek dapat dibantu dengan data-data biaya dari QS sehingga proyek dapat dibangun dengan perencanaan dan anggaran biaya yang ditargetkan. Secara sepintas memang agak sukar dari pihak QS untuk mengatakan berapa penghematan biaya yang akan dicapai apabila QS terlibat dalam proyek pembangunan namun kita jangan lupa bahwa efisiensi dan penghematan biaya proyek adalah suatu proses yang terkait dari awal hingga akhir yang jelas dengan keterlibatan QS di dalam proyek. Setiap biaya yang dikeluarkan untuk proyek akan dapat dipantau dan kewajaran penggunaannya akan lebih jelas.

Aspek Keuangan

Keahlian *Quantity Surveyor* di bidang keuangan hanya terbatas pada bidang pengendalian keuangan/dana untuk pembangunan proyek, dan bukan ilmu keuangan umum dan perbankan pada prinsipnya *Quantity Surveyor* akan mengendalikan/mengurus dana untuk proyek bisa berbentuk suatu anggaran biaya yang dibuat melalui perkiraan oleh *Quantity Surveyor*. Anggaran biaya untuk proyek biasanya dipecahkan secara detail ke dalam pos-pos yang dialokir kesatuan-kesatuan kerja konstruksi. Dengan pengaturan ini segala seluk beluk keuangan proyek dapat dikendalikan oleh *Quantity Surveyor*.

Untuk mengurus dana konstruksi secara efektif kita memerlukan suatu pengetahuan yang cukup luas mengenai hubungan antara perencanaan dan aktivitas dalam konstruksi sehingga kita dapat mengetahui

semua aspek pembiayaan proyek selain mengetahui mengenai pembiayaan pembangunan proyek dan proses perhitungan biaya ini, Quantity Surveyor harus juga memperhatikan semua kriteria ekonomi yang mempunyai efek terhadap industri konstruksi secara umum misalnya mengetahui prosedur-prosedur administrasi maupun operasional yang akan diperlukan untuk melaksanakan proyek di daerah tersebut, dan tidak kalah pentingnya jika kita mengetahui dan memantau pergerakan/gejala-gejala ekonomi disekitarnya yang paling penting adalah merangkum semua kriteria-kriteria ini dan mengaplikasikannya kepada proyek yang kita bangun khususnya dari segi pembiayaan sehingga segala kemungkinan-kemungkinan yang mempunyai efek langsung terhadap pembiayaan proyek dapat diperkirakan sedini mungkin. Biasanya *Quantity Surveyor* akan menganggarkan biaya-biaya tertentu yang diperkirakan berdasarkan kriteria-kriteria dan gejala-gejala ekonomi yang ada pada saat perencanaan/perhitungan biaya proyek yang akan dibangun.

Keahlian Quantity Surveyor di bidang keuangan proyek-proyek konstruksi bermula dari latihan dan pelajaran-pelajaran di bidang "*Building Economics*", "*Development Economics*", "*Economics Theory*", "*Basic Principle of Accounting*" dan "*Cost Estimating*". Semua ilmu pengetahuan keuangan ini belum cukup untuk membuat perkiraan biaya proyek, dan untuk melengkapi kekurangan ini *Quantity Surveyor* harus fasih dan faham di bidang teknik bangunan. Dengan mengetahui teknik bangunan semua komponen yang akan dibangun dapat diketahui dan selanjutnya diterjemahkan ke bentuk biaya-biaya (satuan-satuan kerja)

yang secara keseluruhan rangkuman ini akan menjadi biaya pembangunan proyek secara menyeluruh.

Tugas quantity surveyor belum selesai dengan selesainya pembuatan rencana biaya/dana proyek, tetapi tugasnya masih dilanjutkan dengan mengurus penggunaan dana proyek hingga proyek selesai dibangun. Dengan semua uraian yang telah diungkapkan seperti di atas maka Quantity Surveyor adalah seorang pakar di dalam teknik pengendalian biaya konstruksi.

Aspek Kontrak

Keahlian Quantity Surveyor di bidang kontrak adalah suatu kelanjutan dari fungsi pengendalian biaya. Di dalam pelaksanaan fisik pembangunan proyek para konsultan yang tergabung di dalam tim manajemen proyek akan bertugas sebagai Pengawas Pelaksanaan Fisik Proyek sedangkan Pembangunan Fisik Proyek akan dilaksanakan oleh kontraktor. Untuk pelaksanaan fisik dan pengawasan fisik tentunya harus dilaksanakan dengan prosedur dan tata cara yang disetujui oleh semua pihak, dan untuk itu maka dibuatlah suatu tata cara pelaksanaan yang dituangkan ke dalam persyaratan-persyaratan pelaksanaan proyek.

Persyaratan-persyaratan pelaksanaan kontrak adalah suatu instrumen melaksanakan proyek dan pihak yang terkait dengan kontrak ini, umumnya pemilik akan mendelegasikan wewenangnya kepada tim manajemen proyek sebagai pengawas pelaksanaan proyek. Quantity Surveyor mempunyai peran yang cukup penting dalam menyusun dan menginterpretasikan persyaratan-persyaratan kontrak yang digunakan di

dalam pembangunan proyek. Para konsultan lain seperti arsitek, mrk dan struktur cukup fasih mengenai persyaratan-persyaratan kontrak ini, tetapi Quantity Surveyor mengkhususkan diri di bidang ini oleh karena kaitannya terhadap biaya/dana proyek yang harus dikendalikan.

Persyaratan-persyaratan pelaksanaan kontrak bisa dibuat khusus atau menggunakan persyaratan-persyaratan yang sudah umum dipakai dan membuat modifikasi-modifikasi sesuai dengan keperluan proyek. Di Indonesia persyaratan-persyaratan kontrak ini banyak yang dibuat berdasarkan "A.V", "JCT", dan "FIDIC", selain persyaratan-persyaratan kontrak yang dibuat oleh Departemen Pekerjaan Umum, atau Departemen lainnya.

Keahlian di bidang kontrak biasanya dikaitkan dengan Prosedur Hukum secara umum, tetapi Quantity Surveyor tidak berfungsi sebagai Advokat (Penasehat Hukum) atau Notariat tetapi hanya aspek hukum yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pembangunan proyek.

Quantity Surveyor dalam tahap belajar dan latihan diberikan pelajaran-pelajaran dasar mengenai Hukum Perusahaan, "Law of Tort" dan "Law of Neglegence". Berdasarkan pengetahuan dasar hukum, Quantity Surveyor dikhususkan untuk mempelajari Persyaratan-persyaratan Kontrak Konstruksi. Dengan bekal pengetahuan ini Quantity Surveyor dapat menyelesaikan "Claim Kontraktor di Lapangan dan "Dispute" yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak.

Peran Quantity Surveyor Di Industri Konstruksi

1. Pemilik
2. Konsultan
3. Kontraktor

Selain itu peran-peran seperti : Supplier, Tenaga Kerja, Badan-badan pemerintah, Bank dan lainnya juga berperan dan terlibat dalam suatu Industri Konstruksi. Dalam katagori ketiga di atas, Quantity Surveyor dapat memerankan profesinya:

1. Sebagai Staff Ahli Manajer Proyek
2. Sebagai Staff Ahli Manajemen Konstruksi
3. Sebagai Konsultan Independen di Tim Manajemen Proyek. •





PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) KONSTRUKSI BELUM MENJADI SUATU KESATUAN PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Oleh : Sari Mustika

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan kebutuhan dasar manusia dalam bekerja dan menjadi bagian yang semakin tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pekerjaan itu sendiri. Kecelakaan kerja di sektor konstruksi masih sering terjadi, baik pada skala pekerjaan konstruksi kecil maupun besar, dan menggunakan teknologi tinggi maupun teknologi sederhana. Hal ini

dimungkinkan bilamana penerapan penyelenggaraan K3 Konstruksi dalam kegiatan pekerjaan konstruksi belum sepenuhnya dilaksanakan atau kurang memahami tentang pentingnya menyelenggarakan K3 pada setiap pelaksanaan pekerjaan.

Sedangkan pada setiap pelaksana pekerjaan konstruksi selalu berkeinginan tidak ada satu pihakpun yang terlibat dalam proses pelaksanaan konstruksi mengalami

celaka yang akan menimbulkan dampak kepada pekerja yaitu meninggal, terluka atau menjadi cacat seumur hidup. Tetapi hal tersebut bila diperhatikan pada beberapa waktu yang lalu masih ada terjadi kecelakaan kerja yang menimpah tenaga kerja konstruksi atau masyarakat umum diluar areal lingkungan kerja. Yang menjadi pertanyaan adalah: Apakah keinginan untuk tidak terjadi kecelakaan kerja itu telah dijamin oleh suatu sistem keamanan kerja yang baik?

Sebetulnya peraturan yang mengamankan tentang keselamatan kerja sudah diterbitkan sejak tahun 1970, di antaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
3. Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
5. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No.174/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi.
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.2 Tahun 1970 tentang Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan Kerja di Tempat Kerja.
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.05/ MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.2 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pengangkatan Ahli K3.

Kenyataannya aturan tinggal aturan, penerapan penyelenggaraan K3 masih jauh dari yang di inginkan agar kecelakaan kerja konstruksi dapat di eliminir atau menjadi Zero Accident. Bila penanganan risiko kecelakaan kerja konstruksi di jalankan dengan manajemen yang baik akan berdampak secara tidak langsung terhadap produktivitas kerja akan meningkat, ketepatan akan waktu penyelesaian pekerjaan dan akhirnya mutu produk konstruksi akan menjadi lebih baik.

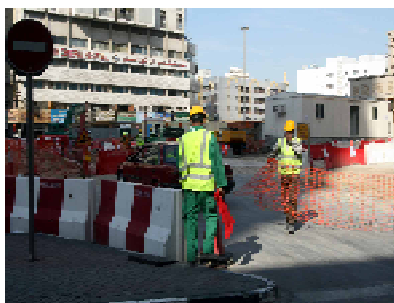
Beberapa aspek yang diperkirakan bisa menimbulkan terjadinya risiko kecelakaan kerja konstruksi adalah sebagai berikut:

1. Pelaku-pelaku yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi baik dari pekerja non teknis, tukang, mandor, staf manajer dan manajer.
2. Material konstruksi baik dari saat pemindahan, penyimpanan, dan pada saat penggunaan.
3. Peralatan konstruksi yang berhubungan dengan pekerjaan baik alat berat maupun ringan.
4. Metode konstruksi yang akan di pakai.
5. Perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan konstruksi.

Dari pengamatan kejadian kecelakaan kerja tersebut diatas, kemungkinan-kemungkinan penyebab terjadinya kecelakaan kerja konstruksi adalah sebagai berikut:

1. Kurang disiplinnya para pekerja dalam menggunakan alat pelindung diri.
2. Kelalaian pemimpin pelaksana pekerjaan untuk mensosialisasikan di internal lingkungan kerja akan perlunya alat pelindung diri.
3. Kurang di taati prosedur operasional penggunaan alat-alat pendukung pekerjaan konstruksi.
4. Penerapan sistem manajemen K3 tidak diterapkan secara konsisten.
5. Tidak melibatkan Tenaga Ahli/ Terampil di bidang konstruksi maupun Ahli K3 dalam pelaksanaan konstruksi.
6. Tidak ditaatinya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Demikian kiranya dengan masih terjadi kecelakaan kerja konstruksi, perlu diantisipasi pembinaan yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja baik kepada yang memiliki pekerjaan maupun pelaksana pekerjaan agar *Zero Accident* dapat dicapai.



Dari aspek-aspek yang bisa memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja tersebut diatas dapat terlihat pada kasus-kasus kecelakaan kerja konstruksi yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu sebagai berikut :

Tanggal	Penyebab Kecelakaan	Korban Kecelakaan Kerja
Nov 2006	Longsoran galian pemasangan pipa gas pada saat pekerjaan pengelasan pipa (Desa Pasir Sari, Kec. Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi)	1 orang meninggal 3 orang cedera (pekerja proyek)
17 Jan 2007	Tertimpa tangga beton, sewaktu merapikan/membuka perancah/cetakan tangga beton (perbaikan RSD Kab. Bekasi)	1 orang meninggal dan 1 orang cedera berat (pekerja berat)
7 April 2007	Talud Longsor pd saat berlangsung pekerjaan pengecoran saluran kanal di kegiatan Banjir Kanal Medan (Sodetan S. Deli ke S. Percut Sei Tuan)	4 orang cedera (pekerja proyek)
18 Mei 2007	Terjatuh dari lantai 19 pd saat pekerjaan pemasangan keramik karena tidak mengenakan harness pengaman (Condominium Shangri-La, Jl. RM Margono, Jakarta Pusat)	1 orang tewas (pekerja proyek)
23 Mei 2007	Longsoran galian pemasangan pipa gas pd saat pekerja menggali di kedalaman 1.6 meter (Kelurahan Limus Nunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor)	4 orang cedera (pekerja proyek)
25 Mei 2007	Menara crane roboh ke jalan saat dipindahkan (Gedung Mall Rizt Carlton Kawasan Sudirman Centre Business District, Jakarta Selatan)	1 orang tewas (umum)
8 Juni 2007	Steger ambruk tempat berdiri pekerja dlm finishing pengacian tembok di lantai 37 (Kantor Pasific Place-Kawasan Sudirman Centre Business Distrct, Jakarta Selatan)	2 orang tewas, 2 orang cedera (pekerja proyek)



Oleh : Eddy Sunyoto *)

UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON ANGGOTA DEWAN LPJKN

Adalah merupakan suatu kenyataan yang banyak diamini oleh orang ramai bahwa kinerja LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) masih belum baik. Hal ini pulalah yang menjadikan kegundahan para pembina jasa konstruksi yang berada di jajaran birokrasi. Musti harus segera diambil kebijakan dan upaya nyata untuk mendongkrak kinerja tersebut.

Salah satu upayanya adalah memilih anggota dewan LPJK dari oknum-oknum terbaik dari unsur-unsur yang menjadi pilar LPJK yaitu: asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, pakar-perguruan tinggi dan birokrasi yang benar-benar *best of the best*, pokoknya

bukan hanya sekedar top saja tetapi benar-benar dengan klasifikasi 'markotop'.



Maka, tidak ada cara lain jika para calon anggota Dewan LPJKN harus dipilih melalui suatu

mekanisme pemilihan yang obyektif, cangih dan *up to date*, yaitu proses *fit and proper test* yang dilakukan oleh konsultan rekrutmen independen. Karena dilakukan oleh konsultan dalam negeri, maka namanyapun disesuaikan menjadi "uji kelayakan dan kepatutan untuk calon anggota Dewan LPJK". Untuk itu, Menteri Pekerjaan Umum selaku wakil pemerintah yang berkewajiban membina jasa konstruksi telah menugasi BPKSDM yang tupoksinya adalah membina jasa konstruksi melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan tersebut.

Sebenarnya dalam Anggaran Rumah Tangga LPJK sendiri sudah ada persyaratan yang cukup rinci bagi pimpinan dan pengurus lembaga namun untuk lebih meyakinkan dan mengefektifkan syarat tersebut kelihatannya perlu di uji lagi. Persyaratan tersebut antara lain: (1) Warga negara Indonesia, (2) Sehat jasmani dan rohani, (3) Memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan dan pengalaman di bidang jasa konstruksi, (4) Ketokohan, reputasi, integritas dan



obyektifitas yang secara luas diakui dikalangan masyarakat jasa konstruksi, (5) Tidak dalam status terpidana, (6) Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menyumbangkan tenaga, pikiran dan waktu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota Dewan Pengurus LPJK serta membuat pernyataan tertulis di atas meterai tentang kesediaan untuk memenuhi dan mengikat diri pada Anggaran Dasar dan Rumah tangga lembaga serta kode etik Dewan Pengurus Lembaga.

Mendahului pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan, dilakukan pembekalan bagi seluruh peserta. Pembekalan disampaikan oleh para pembina dengan harapan agar para calon lebih memiliki



wawasan dan memahami tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan LPJK, keinginan dan harapan terhadap masa depan jasa konstruksi serta yang paling penting adalah menghayati Undang-undang Jasa Konstruksi.

Metodologi pengujian dilakukan dengan test tertulis secara klasikal, kemudian dilanjutkan dengan penulisan proposal dan diakhiri dengan wawancara secara individual.

Aspek-aspek yang ingin diukur adalah mencakup potensi perilaku seperti: perilaku dalam berpikir, perilaku dalam kelompok kerja serta perilaku dalam bekerja. Selain hal tersebut, juga pemahaman atas peraturan perundang-undangan, usaha jasa konstruksi dan pengembangan jasa konstruksi baik nasional maupun internasional.

Penilaian disampaikan dalam wujud psikogram masing-masing peserta, profil kompetensi dan rekapitulasi hasil seluruh peserta berupa urutan peringkat.

Dari upaya yang telah dilakukan tersebut, mudah-mudahan kita akan memperoleh anggota Dewan Lembaga yang benar-benar dapat memenuhi harapan serta dambaan seluruh masyarakat jasa konstruksi. Waktu akan membuktikan hal tersebut. ♦

Penulis adalah Widyaiswara Madya Dep. PU

Konstruksi Indonesia Bersiap Hadapi Tantangan Global

TANTANGAN jasa konstruksi Indonesia di masa mendatang semakin bertambah. Melalui WTO dimana Indonesia ikut serta di dalamnya, tahun 2010 mendatang pasar jasa konstruksi Indonesia harus bersiap menghadapi serbuan pelaku jasa



konstruksi asing. Sedangkan tahun 2008 yang tak lama lagi datang, pekerjaan konstruksi domestik untuk pembangunan infrastruktur akan mengalami booming. Kesiapan masyarakat jasa konstruksi Indonesia menghadapi tantangan-tantangan tersebut sangat diharapkan, demikian disampaikan Kepala BPKSDM Iwan Nursyirwan saat membuka Workshop Fasilitasi dan Pengembangan LPJK Kamis (21/06) di Jakarta.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagai wadah masyarakat jasa konstruksi di Indonesia sangat diharapkan mampu menjadi fasilitator sekaligus pendorong bagi pelaku jasa konstruksi menghadapi tantangan baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu pekerjaan rumah LPJK menjelang Munassus perlu segera diselesaikan. Pekerjaan rumah itu antara lain mempersiapkan strategik plan LPJK ke depan, penyediaan data pelaku jasa konstruksi Indonesia termasuk potensi dan kekuatan yang dimiliki, membangun kompetensi melalui pembinaan pelaku jasa konstruksi, membentuk jaringan dengan investor dan instansi terkait lainnya, membuka pasar di luar negeri, permasalahan kualifikasi usaha serta memperbaiki kegiatan sertifikasi Badan Usaha yang selama ini telah dilakukan.

Beberapa waktu lalu, menurut Iwan Nursyirwan, Menteri Pekerjaan Umum menerima tawaran dari utusan Al-Jazair agar kontraktor-kontraktor Indonesia berkiprah disana. Tentunya tawaran ini sayang untuk dilewatkan dan sangat

membanggakan sebab menunjukkan kemampuan Indonesia mulai diperhitungkan di dunia Internasional. Namun untuk menyambut tawaran tersebut, dikatakan oleh Iwan Nursyirwan sangat perlu untuk memperhitungkan seberapa besar potensi yang dimiliki pelaku jasa konstruksi di dalam negeri. Jangan sampai tahun 2008 mendatang pembangunan infrastruktur Indonesia tertunda karena kekurangan tenaga kerja dan sumber daya.

Kerjasama dengan sektor lain diluar jasa konstruksi sangat perlu dibangun untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi liberalisasi perdagangan. Disampaikan oleh Iwan Nursyirwan apabila nanti globalisasi sudah benar-benar dilaksanakan dan pasar domestik sudah terbuka untuk pengusaha asing masuk, sektor konstruksi akan sangat membutuhkan dukungan sektor lain untuk melakukan negosiasi dan kerjasama dengan pihak asing, demikian juga sebaliknya. LPJK ke depan diharapkan mampu membaca situasi seperti ini, misalnya dengan mempersiapkan standar SNI untuk kontraktor luar. Diharapkan, LPJK mendatang harus lebih baik dan lebih kompeten, serta menjadi partner pemerintah untuk membangun bangsa. ♦

(tw/nn)

Komitmen MoU Indonesia-India, Dep. PU Laksanakan Kembali Pelatihan Tukang Konstruksi

MELALUI penandatanganan MoU antara Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Luar Negeri Republik India tentang bantuan Vocational Training Centre for Construction Services (VTCCS) untuk Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang dilakukan beberapa hari yang lalu, kerjasama antara India dan Indonesia di bidang pengembangan sumber daya manusia semakin meningkat. Indonesia sendiri berkomitmen dengan adanya kerjasama ini, salah satu buktinya adalah kembali dilaksanakan Pelatihan Tukang Konstruksi Tingkat Pemula Angkatan ke VII Rabu (20/06) di Jakarta. Pelatihan ini terselenggara melalui bantuan VTCCS yang pertama dari Pemerintah India sejak tahun 2005 lalu

untuk Balai Pelatihan Konstruksi Jakarta Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi (PusbinkPKP) BPKSDM Dep. PU.

Kepala BPKSDM yang diwakili Kepala PusbinkPKP Djoko Subarkah dalam sambutannya mengatakan sangat optimis pelatihan yang akan dilaksanakan maupun yang telah dilaksanakan mampu menghasilkan tenaga-tenaga terampil bidang konstruksi siap pakai dan memiliki kompetensi. Terbukti melalui pelatihan yang dilaksanakan di Jakarta telah dihasilkan tenaga terampil konstruksi sejumlah 196 orang dan kini telah bekerja baik di dalam maupun di luar negeri antara lain di Taiwan, Malaysia, Hongkong, dan beberapa negara Timur Tengah. Selain pelatihan, dilaksanakan pula sertifikasi tenaga terampil konstruksi yang hingga saat ini telah mencapai 500 orang. Sertifikasi menjadi suatu hal yang mutlak dimiliki tenaga kerja yang hendak berkiprah



terutama ke luar negeri, sebagaimana disyaratkan oleh negara-negara maju.

Deputy Chief Of Mission Kedutaan Besar India untuk Indonesia, Tiru Murthi pada kesempatan tersebut berharap bantuan peralatan pelatihan konstruksi yang telah diberikan mampu mendorong pemuda-pemuda Indonesia memiliki kemampuan yang dapat diimplementasikan langsung di masyarakat. Dengan demikian pemerintah India telah turut serta membangun perekonomian Indonesia yang sempat terpuruk beberapa waktu yang lalu. Khusus untuk pusat kejuruan yang akan segera dibangun dan dioperasikan dalam waktu dekat ini di NAD, Tiru Murthi berharap masyarakat Aceh dapat segera menikmati adanya manfaat dari pelatihan tenaga-tenaga potensial di NAD sekaligus membangun infrastruktur yang sempat porak-poranda akibat bencana tsunami beberapa waktu yang lalu.

Sebagai partner Dep. PU dan Pemerintah India, Karang Taruna Nasional selama ini

telah berhasil menjadi penyedia tenaga-tenaga siap latih pada pelatihan tukang konstruksi. Dody Susanto, Ketua Karang Taruna Nasional berpesan kepada pemuda-pemuda yang telah diberikan pembekalan untuk menyebarkan keterampilan yang dimiliki di daerah masing-masing sekaligus mandiri menciptakan sendiri lapangan pekerjaan yang berguna tak hanya untuk diri sendiri bahkan juga untuk lingkungannya. Pemuda-pemuda harapan bangsa lah yang diharapkan menjadi pionir pengurangan angka pengangguran di Indonesia.

Karang Taruna Nasional juga siap bekerjasama kembali untuk penyediaan tenaga-tenaga siap latih di NAD sesuai MoU antara Pemerintah Indonesia dan India. Di kancah Internasional, konstruksi Indonesia harus mampu bersaing. Skill dan kompetensi harus dimiliki untuk memenangkan persaingan tersebut. Lomba Tukang Konstruksi tingkat ASEAN yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan menjadi ajang uji diri seberapa siapkah Konstruksi Indonesia menghadapinya, sebelum akhirnya AFTA dilaksanakan dimana pelaku jasa konstruksi Indonesia mau tidak mau harus siap berhadapan langsung dengan pelaku jasa konstruksi asing di kandang sendiri. ♦ (tw/nn)

Kontribusi Konstruksi Indonesia Untuk Palestina

SEBAGAI negara yang anti penjajahan, Indonesia memantapkan diri untuk mendukung perjuangan Palestina agar merdeka dan berdaulat. Hal ini secara jelas disampaikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2006. Dukungan tersebut tidak berdasarkan pada sentimen keagamaan melainkan sesuai amanat konstitusional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Oleh karena itu kebijakan RI terhadap pembentukan pemerintahan nasional Palestina pada tanggal 20 Maret 2007 pemberian dukungan politik, pemberian bantuan tunai darurat, penyediaan beasiswa dalam rangka program kerjasama teknik antar negara berkembang (KTNB), pengiriman tenaga

ahli, penerimaan SDM Palestina untuk magang di berbagai sektor industri.

Utusan Khusus Presiden RI untuk Timur Tengah, Alwi Shihab dalam Forum Temu Nasional Kelompok Ahli Timur Tengah bertajuk 'Merajut Ukhuwah Membangun Kapasitas Palestina' Kamis (07/06) di Jogjakarta mengatakan bahwa perjuangan Palestina perlu mendapat perhatian khusus



dari masyarakat dunia. Solusi yang ditawarkan untuk membantu Palestina bukan hanya sekadar kata tanpa tindakan nyata maupun dalam bentuk kekerasan fisik yang berujung pada bertambahnya korban jiwa, namun lebih dari itu hendaknya berupa solusi positif untuk membangun Palestina dalam perdamaian. Untuk itu Alwi Shihab sangat mendukung rencana dilaksanakannya Konferensi Asia-Afrika untuk pembangunan Palestina sebagai upaya konkrit dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Kermitraan Strategi Baru Asia-Afrika yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

Departemen Pekerjaan Umum sebagai penanggungjawab pembangunan Konstruksi di Indonesia tak ketinggalan turut memberikan rencana nyata sebagai sumbangsih untuk pembangunan infrastruktur di Palestina. Kepala BPKSDM Dep. PU yang diwakili oleh Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat BPKSDM Mochamad Natsir dalam forum tersebut mengatakan bahwa Dep. PU siap untuk mendukung pembangunan Palestina terutama dalam pembangunan infrastruktur. Dukungan tersebut antara lain dalam bentuk kesiapan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh BPKSDM antara lain *Project Cycle*, kerjasama pendidikan melalui beasiswa, serta pelatihan-pelatihan baik keahlian maupun keterampilan konstruksi.

Khusus untuk keadaan Palestina, menurut Mochamad Natsir, pelatihan keterampilan tepat diberikan bagi SDM Palestina yang sedang dalam proses membangun. Pelatihan Keterampilan yang dimaksud

antara lain pelatihan tukang las, tukang batu, tukang kayu, tukang besi, operator alat berat, dan lain sebagainya, yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Keterampilan dan Pelatihan Konstruksi (Pusbin KPK) BPKSDM Dep. PU. Pelatihan yang dilaksanakan tersebut telah dilengkapi dengan ketersediaan peralatan, tenaga pengajar, dan ruangan yang memadai. Dep. PU yakin Palestina mampu untuk bangun dan mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain.

Dikatakan oleh Mochamad Natsir, negara-negara Timur Tengah memiliki prospek bisnis yang sangat baik. Terbukti dengan promosi dagang bidang konstruksi yang selama ini telah dilakukan Dep. PU selalu mendapat sambutan baik. Salah satunya antara lain promosi dagang sekaligus Pameran Potensi Konstruksi Indonesia ke Uni Emirat Arab (UEA) pada Desember tahun lalu yang ternyata mendapat sambutan hangat. Terbukti dengan keinginan mereka agar pelaku jasa konstruksi Indonesia baik tenaga ahli, terampil, maupun perusahaan yang bergerak di bidang Konstruksi Indonesia untuk berkiprah di UEA.

Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Fariz Mehdawi dalam kesempatan tersebut menyatakan sangat gembira terhadap antusiasme dukungan untuk Palestina baik moral maupun fisik yang selalu diberikan Indonesia. Saat ini Palestina yang baru



mulai merangkak untuk berdiri sangat membutuhkan segala bentuk bantuan darimanapun dan dalam bentuk apapun. Konflik dalam negeri dan dengan Israel masih menjadi penghalang bagi Palestina untuk melakukan perbaikan. Untuk itu, Palestina mengharapkan adanya bantuan dari Indonesia dan negara-negara dunia lainnya dalam bentuk dukungan politik, moral, akses bisnis, pemasaran produk-produk Palestina, dan lain sebagainya. Diharapkan dengan semua kerjasama yang telah terjalin ini menjadi langkah awal pembangunan dalam perdamaian di bumi Palestina. ♦ (tw/nn)

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.